



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Sidang ke-	: III (Tiga)
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat (RDP)
Dengan	: Perpustakaan Nasional RI
Hari/Tanggal	: Senin, 25 Januari 2021
Pukul	: 10.00 WIB – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI (secara fisik dan virtual menggunakan Zoom)
Pimpinan Rapat	: Dr. Abdul Fikri Faqih, M.M./Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI
Acara	: <ol style="list-style-type: none">1. Realisasi APBN TA 2020.2. Persiapan Program dan Kegiatan TA 2021.3. Pembahasan Isu Strategis (literasi nasional, perpustakaan berbasis inklusi sosial, pemenuhan kebutuhan pustakawan, dan perpustakaan digital).4. Lain-lain.
Hadir Komisi X DPR RI	: 32 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI
Hadir Pemerintah	: <ol style="list-style-type: none">1. Muhammad Syarif Bando (Kepala Perpustakaan RI).2. Woro Titi Haryanti (Sekretaris Utama).3. Ofy Sofiana (Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi).4. Deni Kurniadi (Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya perpustakaan).5. Joko Santoso (Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan).

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.23 WIB oleh Dr. Abdul Fikri Faqih, M.M./Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Kepala Perpustakaan RI serta menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi X DPR RI mengapresiasi daya serap anggaran Perpustakaan RI pada Tahun Anggaran 2020 mencapai **96,62%** atau sebesar **Rp439.399.016.449,-** (*empat ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta enam belas ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah*) di atas rata-rata daya serap nasional **95%** namun masih dibawah target awal yang ditentukan Perpustakaan RI yaitu **97,62%**.
2. Terkait pelaksanaan DAK Fisik pembangunan gedung perpustakaan di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota pada TA 2020, Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan RI berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah membuat skema anggaran pendampingan untuk segera meningkatkan jumlah koleksi pustaka dan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.
3. Terkait rencana *refocusing* anggaran TA 2021, Komisi X DPR RI menekankan Perpustakaan RI untuk melakukan kajian dan berkoordinasi dengan Kemenkeu RI, agar capaian target program prioritas nasional dan Perpustakaan RI dapat tetap terwujud.
4. Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan RI untuk:
 - a. memastikan penyerapan anggaran DAK Fisik sub bidang Perpustakaan Daerah Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp 550 miliar dapat terserap maksimal.
 - b. mengoptimalkan data hasil riset yang disampaikan Perpustakaan RI, untuk membangun sistem layanan perpustakaan yang terintegrasi antara Perpustakaan RI, Perpustakaan, dan Perpustakaan Desa berbasis data perpustakaan daerah.
 - c. bekerjasama dengan lembaga penelitian yang kredibel melakukan kajian terhadap biaya dan manfaat layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.
 - d. memperhatikan perundang-undangan terkait bidang pendidikan dan kebudayaan antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, menjadi dasar implementasi perencanaan program dan kegiatan Perpustakaan RI.
 - e. menyusun *roadmap* pengembangan perpustakaan (termasuk pemenuhan koleksi pustaka, SDM perpustakaan dan gedung layanan perpustakaan), dengan bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait sebagai upaya untuk meningkatkan literasi dan numerasi serta alokasi anggaran Perpustakaan RI pada tahun-tahun mendatang.
 - f. dalam rangka mengejar ketertinggalan pendidikan selama masa pandemi Covid-19, Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan RI untuk menjadi bagian dalam transformasi pendidikan nasional, dengan menjadikan perpustakaan sebagai wahana pendidikan alternatif selain sekolah.
 - g. Perpustakaan RI tidak hanya adaptif terhadap perkembangan Teknologi Informasi tapi antisipatif menyiapkan SDM maupun kelembagaan yang semakin mapan, termasuk sinergisitas dengan Arsip Nasional RI.

5. Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan RI melakukan langkah-langkah strategis dan berkomunikasi dengan Kemenkeu RI serta Bappenas RI untuk meningkatkan alokasi anggaran Perpustakaan RI yang selama ini selalu berada di bawah angka 1 triliun, antara lain dengan cara:
 - a. memaksimalkan fungsi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten dan undang-undang lain yang terkait.
 - b. memperbanyak program yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di masa pandemi Covid-19, seperti pojok baca digital, layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial dan lain-lain.
6. Terhadap pertanyaan dan catatan Anggota Komisi X DPR RI, Perpustakaan RI akan menyampaikan jawaban tertulis paling lambat tanggal 1 Februari 2021.

III. PENUTUP

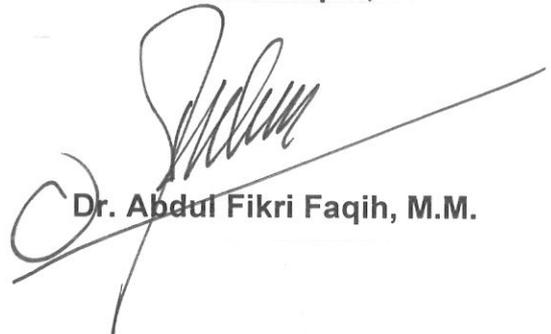
Rapat ditutup pada pukul 13.25 WIB

Kepala Perpustakaan RI



Muhammad Syarif Bando

Ketua Rapat,



Dr. Abdul Fikri Faqih, M.M.